

PERGESERAN STANDAR FEMINISME DALAM PEMILU AS: STUDI TERHADAP POSTFEMINISME DI KALANGAN MUDA

Tri Indah Oktavianti, Muhammad Nur Hasan
Universitas Jember, Jember
mhmmdnurhasan@gmail.com

ABSTRACT

Feminism firmly stands in the front line when it comes to the confrontation against injustice and oppression. Yet, feminism has become too exclusive for the subject of women and privileged for sub-groups like whites and middle-class, who stand as a whole category. By then, feminism is stuck in a time warp as it is unable to diminish the oppression of binary gender and its exclusive category. Under the framework of post-structuralist feminism theory, post-feminism is defined as a positive development of feminism that offers the more comprehensive thinking. This research aims to identify the ideas of post-feminism and analyze how the shifting values of feminism towards post-feminism occur. Through interpretive methods, the researcher identified that post-feminism was about the deconstruction of the subject 'women' and inter-sectionalism. The millennial paradigm shifts in the United States allowed the creation of preferences that was diverse and unlimited to a specific gender perspective. Thus, the political preferences of feminists were not only limited to the assumption of women that should choose a female president. Therefore, supporters of the millennial wave phenomena of Bernie Sanders in the primary caucus of Democratic Party of US elections in 2016 became one of the reflections of the millennial post-feminism ideas.

Keywords: feminism, binary gender, post-structuralist feminism, post-feminism

1. Pendahuluan

Perjuangan kaum wanita dalam menuntut kesetaraan hak dengan kaum laki-laki telah menjadi bagian dari sejarah Amerika Serikat. Konvensi hak perempuan pertama yang diselenggarakan pada tahun 1848 di Seneca Falls, New York, dihadiri oleh 300 laki-laki dan perempuan yang menuntut persamaan hak pilih politik bagi wanita. Konvensi ini menghasilkan Declaration of Sentiments yang sekaligus menjadi tonggak dari pergerakan kaum wanita di Amerika Serikat.

Namun, sejak deklarasi kemerdekaan 240 tahun yang lalu hingga saat ini, Amerika Serikat belum pernah dipimpin oleh seorang figur presiden perempuan. Bahkan representasi wanita dalam bidang politik di Amerika Serikat, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif masih tergolong rendah. Gender gap dan gender stereotype yang memunculkan anggapan bahwa perempuan tidak memiliki cukup kualifikasi dibandingkan laki-laki dalam hal politik

menjadi hambatan bagi perempuan untuk berkompetisi dalam dunia politik modern Amerika Serikat hingga kini.¹

Dominasi kaum laki-laki memperkecil kesempatan bagi wanita untuk berkembang dan menempati posisi-posisi penting dalam perpolitikan Amerika Serikat sehingga menjadikan politik itu sendiri sebagai 'arena maskulin'. Namun, ini bukan berarti bahwa partisipasi politik wanita di tidak mengalami perkembangan. Jumlah Amerika Serikat prosentase kursi dalam Kongres Amerika Serikat yang dijabat oleh wanita pada tahun 2015 meningkat enam kali lebih besar dibandingkan prosentase di

¹ Center for American Women and Politics (CAWP). (2016). *Women presidential and vice presidential candidates: A selected list*. Retrieved from http://www.cawp.rutgers.edu/levels_of_office/women-presidential-and-vice-presidential-candidates-selected-list

tahun 1979.²Selain itu, Amerika Serikat terus mengalami kemajuan dalam sektor hak-hak perempuan, mulai dari kesetaraan dalam pendidikan melalui Civil Rights Act tahun 1964, kesetaraan gaji dalam aktivitas ekonomi melalui Equal Pay Act tahun 1968, dan bentuk-bentuk hak atas dasar kesetaraan gender lainnya. Kini perempuan dapat bersaing secara bebas dalam perebutan kursi presiden, seperti Hillary Clinton yang pada tahun 2016 maju menjadi salah satu kandidat presiden dari kubu Partai Demokrat.

Bagi sebagian golongan feminis, keputusan Hillary Clinton untuk maju dalam pemilu dianggap merupakan suatu langkah besar bagi perubahan politik Amerika Serikat yang selama ini cenderung didominasi oleh laki-laki. Mereka yang mendukung Clinton percaya bahwa dengan terpilihnya Clinton sebagai presiden, setidaknya hal ini akan membawa revolusi bagi keadilan kaum perempuan di Amerika Serikat. Yang menarik adalah fakta bahwa sebagian besar kaum milenial terutama perempuan justru menunjukkan keberpihakan kepada Bernie Sanders, kandidat kuat lain dari Partai Demokrat. Pada bulan Januari 2016, Bernie Sanders (74 tahun), senator negara bagian Vermont, memimpin perolehan suara jajak pendapat di kalangan anak-anak muda terutama perempuan muda dengan prosentase 50% atau 19 poin lebih besar daripada Clinton yang hanya mendapat 31% suara, dan hasil ini terus mengalami peningkatan pada bulan-bulan berikutnya.³

² Institute for Women's Policy Research. (2015). *Status of women in the states: Political participation full section*. Retrieved from <https://statusofwomendata.org/explore-the-data/political-participation/political-participation-full-section/>

³ USA Today. 2016. *Sanders A Hit With Millennial Women*. Diakses dari <http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/01/14/bernie-sanders-hillary-clinton-womenmillennials/78810110> [15 Maret 2016].

Menanggapi hal ini, Gloria Steinem (81 tahun) - salah satu ikon feminis gelombang kedua dari era 60-an, dalam acara talkshow Real Time with Bill Maher di salah satu stasiun televisi Amerika Serikat, mengatakan bahwa “Ketika kita muda, kita berpikir, di mana para anak laki-laki? Anak laki-laki bersama dengan Bernie (Bernie Sanders)”. Sejalan dengan Steinem, Madeleine Albright (78 tahun), mantan menteri luar negeri Amerika Serikat yang sekaligus menjadi menteri luar negeri perempuan pertama Amerika Serikat, dalam kampanye terbuka Hillary Clinton di negara bagian New Hampshire, mengatakan bahwa “Ada tempat khusus di neraka bagi perempuan yang tidak menolong sesama kaum perempuan”.⁴

Bagi kaum feminis golongan tua, memilih Clinton adalah tindakan feminis. Bagi kaum milenial (generasi pemilih yang lahir pada dekade 1990-an), memilih kandidat presiden sesuai dengan pilihan pribadi merupakan perwujudan mimpi-mimpi feminisme. Perbedaan nilai yang diusung antara kaum milenial dan kaum feminis golongan tua mengindikasikan telah terjadinya pergeseran ide atau standar feminisme yang salah satunya tercermin dalam kaukus primer Partai Demokrat dalam pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Tulisan ini akan membahas bagaimana ide-ide postfeminisme di kalangan kaum milenial tercermin dalam pergeseran preferensi politik dalam persaingan pemilihan kandidat presiden dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

⁴ The New York Times (NY Times). 2016. *Gloria Steinem and Madeleine Albright Rebuke Young Women Backing Bernie Sander*. http://www.nytimes.com/2016/02/08/us/politics/gloria-steinem-madeleine-albright-hillary-clinton-bernie-sanders.html?_r=0 [diakses pada 1 Maret 2016].

2. Kerangka Konseptual

Dalam mengkaji tren postfeminisme di kalangan kaum milenial Amerika Serikat, penulis menggunakan kerangka berpikir poststrukturalis feminisme. Poststrukturalis muncul sebagai kritik terhadap paradigma positivis yang berdiri di atas kerangka metanarrative dan klaim kebenaran universal. Secara ontologis, poststrukturalis feminisme sejalan dengan standpoint feminist dimana konstruksi feminitas dan maskulinitas telah menciptakan ruang publik dan ruang privat. Secara epistemologis, poststrukturalis feminisme menolak penggambaran wanita sebagai “korban” yang mengindikasikan pula bahwa wanita bertindak pasif, lemah, dan patut dikasihani sehingga wanita tidak dipandang sebagai makhluk politik yang sederajat. Oleh karenanya, poststrukturalis feminisme mendekonstruksi subjek dengan menolak binary thinking yakni pembentukan gender secara sosial berdasarkan unsur-unsur biologi seksual laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, poststrukturalis feminisme menolak subjek “kelompok wanita” yang melawan musuh laki-laki sehingga menjadikan poststrukturalis feminisme memiliki subyektivitas yang tidak tunggal atau non-unitary (Sheperd, 2010:51).

Dekonstruksi subjek “wanita” sebagai kelompok dalam wacana yang selama ini tersaji dalam realitas masyarakat, juga menjadi faktor mengapa poststrukturalis feminisme menolak naratif essentialism yang menyatakan bahwa entitas tertentu seperti misalnya kelompok manusia, objek fisik, konsep pengetahuan, dll. Memiliki kesamaan atribut yang membentuk suatu identitas tunggal dengan fungsi kolektif (Phillips, 2010: 49). Ide esensialitas ditolak oleh poststrukturalis feminisme karena dianggap sebagai bentuk tekanan dan dominasi terhadap mereka yang

tidak terkonfirmasi sebagai bagian dari kelompok. Misalnya esensialitas wanita akan menghiraukan eksistensi mereka yang tidak dikategorikan sebagai wanita sehingga hierarki sosial berdasarkan gender tidak akan runtuh, melainkan hanya akan terus menguat dan membentuk sub-hierarki baru.

Belum ada kesepakatan definitif mengenai apa yang dimaksud dengan postfeminisme di kalangan para pengkaji gender dan feminis. Postfeminisme setidaknya memiliki dua kategori pengertian: (1) Pengertian negatif, Postfeminisme sebagai berakhirnya feminisme karena keberhasilan (McRobbie, 2009) atau kegagalan feminisme dalam mewujudkan tujuannya (Tasker, 2007). (2) Pengertian Positif, Postfeminisme adalah tahapan lebih lanjut dari fase feminisme, atau bentuk penyempurnaan dari gelombang-gelombang feminisme sebelumnya (Brooks, 1997: 198-208).

Penulis dalam karya ini cenderung menggunakan definisi postfeminisme secara positif yang didasarkan pada keyakinan penulis tentang relevansi gerakan feminisme itu sendiri dan keselarasannya dengan ide-ide poststrukturalis feminisme yang bersifat sebagai kajian kritis yang dinamis dan terus mengalami perkembangan.

3. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini berbasis studi literatur, yang artinya penulis tidak melakukan observasi lapangan langsung, melainkan merujuk pada informasi yang telah tersaji dalam sumber-sumber sekunder berupa penelitian terdahulu, buku, jurnal, berita, dan sumber-sumber lain yang relevan bagi topik berkaitan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan metode penelitian interpretatif yang berawal dari posisi bahwa pengetahuan kita tentang realitas termasuk wewenang atas tindakan

manusia adalah konstruksi sosial oleh aktor manusia yang juga berlaku bagi peneliti. Oleh karena itu, metode ini bertolak belakang dengan asumsi positivis yang percaya bahwa tidak ada realitas objektif yang dapat ditemukan oleh peneliti. Pendekatan penelitian interpretatif terhadap hubungan teori dan praktik adalah peneliti tidak bisa mengambil posisi netral atau bebas nilai, dan hal ini selalu tercermin dalam fenomena yang dipelajari.

4. Hasil Penelitian

Karya ini mengidentifikasi adanya pergeseran sudut pandang dalam menyikapi isu-isu gender dan feminisme yang diusung oleh kaum muda Amerika Serikat. Pergeseran standar tersebut diindikasikan oleh perubahan preferensi kaum milenial yang tidak lagi terkurung dalam persepsi gender. Kaum milenial tidak lagi tertekan dengan asumsi bahwa perempuan memiliki kewajiban untuk memilih kandidat presiden perempuan. Dengan demikian, perdebatan yang berlangsung mengenai isu presiden perempuan dan kritik yang dibangun oleh kaum milenial membantu identifikasi postfeminisme dan menjelaskan bagaimana ide-ide postfeminisme tercermin dalam dukungan masif kaum muda terhadap kandidat presiden Partai Demokrat, Bernie Sanders.

4.1. Perdebatan Isu Sentral Presiden Wanita

Dalam wacana proposisi terhadap kepemimpinan seorang perempuan dalam bidang politik, terdapat beberapa isu sentral yang menjadi perdebatan kaum feminis. Pertama, isu kesetaraan gender. Bagi kaum feminis golongan tua, terpilihnya seorang

perempuan menjadi seorang presiden dianggap sebagai suatu solusi bagi ketimpangan gender yang selama ini mendera perempuan sebagai makhluk tingkatan kedua. Jika perempuan terpilih menjadi seorang presiden, maka hal ini akan mampu membuktikan bahwa perempuan mampu bersaing secara sejajar dengan laki-laki dan presiden perempuan akan membawa perubahan menuju sistem yang lebih adil. Kaum milenial di sisi lain berpendapat bahwa aspirasi politik tidak seharusnya dipengaruhi oleh jenis kelamin atau gender yang disandang oleh seorang figur politik. Kaum muda atau milenial mengatakan akan menjadi salah ketika mereka memilih Clinton hanya karena Clinton adalah seorang wanita.⁵

Kenyataannya, seorang perempuan yang menjadi presiden tidak menjamin terciptanya suatu sistem yang sejajar karena presiden hanyalah sebatas simbol kekuasaan. Simbol diciptakan untuk merepresentasikan nilai-nilai atau material yang diinginkan oleh sistem yang menciptakan simbol tersebut. Dengan kata lain, kehadiran presiden perempuan tidak dapat dijadikan sebagai tujuan akhir dari feminisme karena tujuan menciptakan sistem yang tidak opresif belum tercapai.

Anggapan bahwa presiden perempuan akan dapat menciptakan sistem yang lebih adil juga cenderung menentukan. Tidak ada jaminan bahwa gender harus berpaku pada hal yang bersifat biologis seperti sex atau jenis kelamin sehingga tidak ada alasan untuk menempatkan femininity pada tubuh perempuan atau maskulinitas pada tubuh laki-laki. Dengan kata lain, jika seorang terlahir berjenis kelamin

⁵ Pew Research Center. (2015). Chapter 2: What makes a good leader, and does gender matter? *Women and leadership*. Retrieved from <http://www.pewsocialtrends.org/2015/01/14/chapter-2-what-makes-a-good-leader-and-does-gender-matter/>

perempuan, maka tidak seharusnya dia diharapkan untuk mengaplikasikan nilai-nilai femininity dan sebaliknya (Butler, 1990: 30). Sebagai kasus perbandingan adalah sosok perdana menteri perempuan Inggris di era 80an, Margaret Thatcher yang kebijakan politiknya tidak pernah berbasis equality dan sangat jauh dari politik feminis. Sehingga dalam perdebatan tentang kesetaraan gender, kaum feminis golongan tua terjebak dalam argumen yang over-simplified.

Kedua, isu hak perempuan dalam bidang politik. Teknologi kekuasaan yang bekerja sama dengan kebudayaan maskulin memasukkan ide-ide tentang bagaimana perempuan secara natural tidak diperuntukkan bagi urusan politik (Foucault, 1980: 52). Oleh karenanya, bagi kaum feminis golongan tua, ketika perempuan menjadi presiden maka tidak saja hak-hak politik perempuan pada akhirnya tercapai, namun hal ini juga dapat menginspirasi perempuan-perempuan lain bahwa yang membedakan kemampuan politik laki-laki dan perempuan hanyalah wacana diskursif dan kontruksi yang berlandaskan ide-ide subjektif maskulinitas belaka. Berbeda dengan kaum feminis golongan tua, kaum milenial menganggap bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dalam bidang politik tidak hanya terbatas pada bagaimana perempuan mencapai jabatan politik. Kita perlu kembali ke genealogi feminisme dimana gerakan feminisme dilandasi oleh cita-cita untuk terlepas dari kekangan dan norma-norma patriarkal yang otoriter. Dengan mewajibkan perempuan-perempuan untuk memilih presiden perempuan, maka sebenarnya kaum feminis golongan tua telah menciptakan norma otoriter yang justru mengekang hak-hak politik perempuan muda. Bahwasanya, tujuan dari feminisme itu sendiri bukanlah jabatan politik, namun terpenuhinya hak otonomi setiap individu untuk menentukan apa yang terbaik baginya

tanpa harus dimanipulasi dan didominasi oleh sistem yang selalu bias gender.

Isu yang ketiga adalah Solidaritas Perempuan (*sisterhood*). Persamaan identitas biologis, status sosial sebagai mahluk yang tertindas, serta klaim persamaan tujuan yakni mencapai kehidupan yang lebih baik, menjadi salah satu landasan berpikir beberapa golongan feminis terutama kaum feminis beraliran radikal dari era gelombang kedua (Tong, 2009: 24). Maka sebagian besar kaum feminis percaya bahwa perempuan harus membantu satu sama lain dan berjuang bersama melawan opresi patriarki (Krolokke, 2006: 9). Konsep *sisterhood* ini menjadi problematik dibuktikan dengan beberapa kritik antara lain, pertama, *sisterhood* menunjukkan bahwa feminis eksklusif hanya untuk kaum perempuan dan lebih lanjut *sisterhood* menekankan persamaan identitas perempuan dengan asumsi bahwa perempuan berbagi nasib yang sama sebagai korban kebudayaan yang opresif. Ini artinya solidaritas perempuan yang terbentuk melalui ikatan *sisterhood* ini menegaskan tujuan feminisme sebagai sekelompok perempuan yang menjadi korban dan bersatu mengumpulkan kekuatan melawan status quo. Definisi ini justru membuat pemikiran feminisme yang kaya direduksi menjadi seolah-olah feminisme hanya gerakan sosial politik perempuan yang menyatakan perang terhadap laki-laki dan menginginkan posisi yang dicapai oleh laki-laki semata. Kedua, solidaritas perempuan yang menekankan persamaan karakter perempuan justru membuat perempuan sebagai individu yang tidak unik. Pada akhirnya, perempuan sebagai individu yang tidak unik karena memiliki keterbatasan dalam cara pandang justru menguatkan legitimasi masyarakat patriarki untuk terus menekan perempuan dan menempatkannya di kelas kedua.

4.2. Kritik Bagi Paradoks Feminisme

Perdebatan isu presiden perempuan ini membawa kritik lebih lanjut bagi kaum feminisme yang sekaligus menjadi paradoks bagi feminisme itu sendiri. Pertama, seksisme dalam feminisme. Perempuan sebagai subjek dari feminisme akan terus menciptakan wacana bahwa sebenarnya disparitas seksualitas dan gender adalah suatu yang tidak dapat dipungkiri. Feminisme membentuk identitas bagi perempuan sebagai pihak yang tidak dapat disamakan dengan laki-laki berdasarkan gender dan seksualitas yang disandang, sehingga subjek feminisme itu sendiri menjadi suatu yang diskursif dikonstruksikan oleh sistem politik yang seharusnya memfasilitasi emansipasi feminisme itu sendiri (Butler, 1990: 2). Pembentukan subjek perempuan dalam feminisme memperkuat status binary dengan suatu praktik yang bersifat exclusionary. Dengan memfokuskan diri pada hak-hak perempuan dan subjek perempuan, feminisme telah mengalienasi diri mereka dan menutup ruang bagi laki-laki. Feminisme pada akhirnya mengubah fokus mereka menjadi gerakan yang anti laki-laki. Padahal salah satu tujuan utama dari feminisme adalah mengakhiri era seksisme, dimana manusia dinilai berdasarkan status seksualitas dan gender yang disandang. Namun feminisme telah bertransformasi menjadi salah satu aktor penggiat seksisme itu sendiri dengan mengeliminasi laki-laki dari perjuangan emansipasinya hanya karena mereka “laki-laki”.

Sejatinya, feminisme mengusung nilai-nilai anti-seksisme karena seksisme yang menimbulkan banyak permasalahan, terlepas dari siapa pelakunya, laki-laki ataupun perempuan. Oleh karenanya, feminisme seharusnya untuk siapa saja, tidak hanya terbatas pada subjek perempuan (Hooks, 2000: 1).

Kritik kedua bagi feminisme gelombang sebelumnya adalah kesenjangan feminisme dengan ide-ide interseksional. Istilah interseksional pertama kali diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw dalam karyanya *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Anti Discrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics*. Interseksional adalah kerangka berpikir yang harus diberlakukan pada semua aspek keadilan sosial, kerangka yang mewadahi berbagai macam aspek identitas yang memperkaya kehidupan kita (Uwujaren, 2015). Tidak dapat dipungkiri bahwa gender saling tumpang tindih dengan status etnis, ras, kelas ekonomi-sosial, agama dan karakteristik regional serta lokalitas yang secara diskursif juga terbentuk menjadi identitas manusia. Perempuan memang kerap kali dijadikan sebagai objek seksual, namun pengalaman yang dimiliki oleh perempuan heteroseksual berbeda dengan pengalaman yang dimiliki oleh perempuan lesbian atau perempuan transgender. Perempuan berkulit hitam mendapatkan diskriminasi lebih dibandingkan perempuan berkulit putih, yaitu diskriminasi sebagai seorang “perempuan” dan diskriminasi atas rasnya yang selalu dikaitkan dengan kriminalitas dan kemiskinan.

Ketika satu sub-identitas menjadi perwakilan atas semua identitas maka hal itu menimbulkan permasalahan (Phillips, 2010: 17). Kritik terhadap esensialitas gender tidak hanya mengkritik bagaimana klaim terhadap “subjek perempuan” sebagai suatu yang terlalu disamaratakan, namun kritik esensialitas juga menunjukkan bagaimana generalisasi perempuan sebagai suatu tindakan hegemonis yang dilakukan oleh mereka yang menyanggah status khusus yang lebih tinggi atau privilege (yang biasanya disandang oleh perempuan kulit putih, dari kawasan negara-negara Barat,

kelas menengah, dan heteroseksual) menunjukkan isu perempuan yang paradigmatic (Narayan, 1998: 86). Hal ini kemudian menjadi suatu paradoks bagi feminisme itu sendiri ketika perempuan menekan perempuan lain karena privilege yang dimiliki.

Kritik yang ketiga adalah standar dualisme yang diusung oleh feminisme. Terilhami atas opresi yang dialami perempuan dan femininity, maka feminisme muncul sebagai bentuk kritik sosial terhadap rezim gender yang tidak adil. Feminisme berkembang menjadi suatu ide pergerakan sosial-politik yang melawan seksisme dan diskriminasi. Namun, pembentukan subjek 'perempuan' sebagai subjek feminisme menjadikan feminisme dipandang dengan perspektif yang salah kaprah. Hal ini terjadi ketika feminisme menjelma menjadi gerakan perempuan yang marah pada laki-laki, benci terhadap laki-laki dan ingin menempati posisi laki-laki. Pada akhirnya, feminisme yang menentang seksisme justru menjadi gerakan yang menciptakan dan melestarikan budaya seksisme itu sendiri.

Tidak saja menciptakan kebenaran berdasarkan preferensi kalangan perempuan tertentu (kulit putih, kelas menengah, heteroseksual) seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kaum feminis golongan tua juga melakukan opresi terhadap perempuan-perempuan muda untuk melakukan apa yang 'seharusnya' feminis lakukan. Hal ini menjadikan feminisme itu sendiri menjadi kelompok yang mengemansipasi kalangan tertentu namun tetap melakukan praktik-praktik opresi bahkan terhadap mereka yang seharusnya menjadi subjek yang difasilitasi emansipasinya. Maka feminisme itu pun terjebak dalam double standard yang kerap kali membuat gerakan feminisme sebagai suatu gerakan yang tidak relevan dan hanya berupa tren sekelompok perempuan

'pemarah' dan lesbian (karena sifatnya yang anti laki-laki).

4.3. Pergeseran Standar Feminisme dan Identifikasi Postfeminisme

Menjadi bagian dari perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin global dan tereduksi melalui peranan teknologi, generasi muda pun lahir sebagai generasi yang kritis. Ide-ide feminisme di kalangan generasi muda pun terus mengalami perkembangan secara akademis melalui kritik-kritik yang dibangun terhadap wacana yang ada. Dalam definisi yang positif, postfeminisme merupakan konsep yang memadu-padankan konsep postmodernisme/poststrukturalisme dengan konsep feminisme. Postmodernisme atau Poststrukturalisme menawarkan analisa kritis yang kompleks terhadap foundationalism dan esensialitas, sedangkan feminisme menawarkan konsep tegas dalam kritik sosial yang terkadang juga berfokus pada foundationalism dan esensialitas. Sehingga perdebatan dalam postfeminisme tidak lagi terbatas tentang equality atau bagaimana cara kita mencapainya, namun lebih luas memperdebatkan tentang perbedaan dan mempertanyakan apa yang dianggap menjadi standar kebenaran dalam wacana feminisme. Postfeminisme menggantikan dualisme dengan diversitas, menggantikan konsensus dengan perbedaan pendapat, dan menciptakan suatu area debat intelektual yang dinamis hingga akhirnya mengarahkan pada bentuk-bentuk pergerakan sosial-politik dalam dunia kontemporer (Gamble, 2001: 41-42).

Kaum milenial mampu membawa analisa hubungan kekuasaan dengan pembentukan kategori gender ke meja perdebatan dalam menyikapi isu identitas perempuan. Sifat kritis dan skeptis generasi milenial terhadap eksistensi identitas perempuan membuat kaum milenial terintegrasi dalam ide-ide feminisme bahkan

lebih jauh kaum milenial telah mengembangkan suatu set teori kebudayaan yang membawa feminisme kembali ke dunia akademis. Kritik sosial milenial terhadap sistem politik yang ada dan kepedulian milenial terhadap kesejahteraan setiap lapisan masyarakat menjadikan milenial sebagai aktivis yang terintegrasi dalam agenda-agenda feminisme. Walaupun tingkat partisipasi kaum milenial dalam pemilu masih tergolong rendah dibandingkan generasi lain, namun hal ini bukan berarti milenial memiliki partisipasi politik yang rendah atau bersifat apatis. Media sosial sebagai alat yang mampu memfasilitasi ide-ide interseksionalitas, interkoneksi, pluralisme, dan kosmopolitanisme dimanfaatkan oleh sebagian besar kaum milenial sebagai alat virtual politik (Williams, 2012: 127). Media sosial telah menjadi outlet dari postfeminisme itu sendiri. Oleh karenanya, salah satu karakteristik dari postfeminis adalah keterkaitannya dengan teknologi khususnya pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari aktivismenya.

Perdebatan dan kritik terhadap standar yang diusung oleh kaum feminisme pada gelombang sebelumnya, membantu penulis dalam mengidentifikasi postfeminisme itu sendiri. Pertama, postfeminisme dapat diidentifikasi melalui dekonstruksi subjek esensial. Postfeminisme mencita-citakan suatu gerakan sosial-politik yang inklusif dan mampu merangkul semua pihak tanpa harus terpaku pada subjek yang esensial. Dalam bukunya, *Gender Trouble*, Judith Butler mengatakan bahwa Foucault telah memberikan kontribusi yang berharga kepada kaum feminis berupa sumber daya untuk berpikir di luar struktur identitas politik yang ada. Kaum feminis harus waspada dan ragu-ragu terhadap ide bahwa politik feminis harus berdasarkan kepentingan dan karakteristik perempuan yang tak terbantahkan. Dengan kata lain,

mencapai apa yang menjadi tujuan politik feminis bukan berarti kemudian feminisme mengusung subjek 'perempuan' mengubah politik menjadi bersifat 'pro-perempuan' demi kesejahteraan 'perempuan'. Kita perlu membentuk pandangan bahwa subjek yang ada selalu dikonstruksi oleh teknologi kekuasaan dan mengabaikan ide-ide yang menyatakan bahwa subjek adalah agen yang rasional dan transparan. Kita juga perlu mengabaikan ide-ide kesatuan dan homogenitas, karena kesatuan dan homogenitas yang terbentuk memiliki kepentingan berupa pelestarian bentuk-bentuk opresi dari identitas yang memiliki higher privilege terhadap identitas yang memiliki lower atau bahkan no privilege. Hal ini diperlukan agar kemudian kita mampu membangun teori hubungan kompleks dari pembentukan subordinasi gender.

Subjek perempuan hanyalah konstruksi dari teknologi kekuasaan untuk menciptakan pergerakan feminisme yang penuh dengan luapan keinginan atau over determination dan gerakan yang menginginkan adanya pemindahan kekuasaan dari status quo terhadap subjek itu sendiri atau displacement (Mouffe, 1993: 83). Jika presiden perempuan adalah tujuan dari feminisme, maka sebenarnya terpilihnya seorang perempuan kulit putih kelas menengah yang heteroseksual hanyalah sekedar luapan keinginan bagi mereka yang berbagi identitas yang sama, dan peristiwa terpilihnya seorang perempuan kulit putih kelas menengah yang heteroseksual hanyalah sebuah pemindahan kekuasaan yang opresif. Jika sebelumnya kekuasaan yang dianggap opresif berada di tangan 'laki-laki', maka displacement ini hanya memindahkan kekuasaan yang bersifat opresif tersebut ke tangan 'perempuan' tanpa menghilangkan unsur opresinya. Oleh karenanya, bagi kaum postfeminis mengkonstitusikan subjek

feminisme secara plural dan tidak hanya terbatas pada subjek tunggal 'perempuan' akan menjadikan feminisme itu sendiri luas dan terbuka pada wacana yang beragam.

Kedua, postfeminisme berangkat dari ide-ide mengenai perbedaan dan interseksionalitas yang menentang segala macam opresi yang diciptakan sedemikian rupa sebagai bagian dari norma kebenaran umum. Feminisme merupakan gerakan yang berawal dari ketidakpuasan terhadap sistem yang opresif dan tidak adil. Sedangkan opresi dan ketidak-adilan tidak hanya terbatas pada subjek 'perempuan' dan bentuk-bentuk opresi tidak hanya didasarkan pada pengalaman perempuan kulit putih atau kaum kelas menengah saja. Postfeminisme muncul sebagai suatu paradigma yang menentang segala bentuk opresi, opresi yang membelenggu perempuan, opresi yang membelenggu ras kulit hitam, opresi yang membelenggu kaum non-cis gender dan opresi-opresi lainnya yang menciptakan sistem yang tidak adil selama ini.

Hubungan kekuasaan telah menciptakan wacana-wacana yang terinternalisasi dan secara kreatif membentuk objek-objek yang tidak berdaya untuk terus memastikan kelanggengan kekuasaan. Dengan begitu pula, postfeminisme hadir sebagai bentuk penolakan terhadap wacana bias dari hubungan kekuasaan yang secara kreatif menciptakan individu-individu yang patuh (*docile bodies*) (Foucault, 1977: 138-139). Dinaungi oleh semangat revolusi menentang opresi dari hubungan kekuasaan, maka postfeminisme pun bersifat lebih inklusif dengan tidak hanya terbatas pada isu-isu opresi subjek 'perempuan', namun juga meluaskan fokus pada ide-ide interseksional seperti misalnya opresi ras, opresi etnisitas, opresi agama, opresi non-cis gender, opresi terhadap ketidakmampuan, opresi laki-laki dan opresi-opresi lainnya.

Ide-ide postfeminisme milenial tercermin salah satunya dalam isu pemilu presiden Amerika Serikat 2016 dimana kaum milenial menolak seruan kaum feminis golongan tua untuk memilih kandidat presiden wanita dengan dalih kesetaraan gender dan pencapaian tujuan feminisme. Kaum milenial yang fokus perjuangannya terletak pada opresi memprioritaskan ide-ide mengenai revolusi sistem yang opresif sebagai kunci permasalahan ketimpangan dan diskriminasi sosial dalam masyarakat. Oleh karenanya, ide-ide postfeminisme milenial menjadi tidak bersimpati terhadap simbol 'perempuan' semata.

Dalam kampanye pemilihan kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat tahun 2016 Bernie Sanders, menawarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan ide-ide postfeminisme. Kebijakan ekonomi politiknya tidak eksklusif bagi kaum ras kulit putih dan golongan kelas menengah. Fokus kebijakannya yang bersifat progresif dan menyerukan ide-ide revolusi sistem oligarki di Amerika Serikat memberikan harapan akan perbaikan status kehidupan terutama bagi kaum-kaum yang termarginalkan oleh sistem yang bias. Misalnya Sanders menjanjikan pemberlakuan pajak yang tinggi bagi para pelaku spekulasi Wall Street sehingga mengurangi kecenderungan spekulasi ekonomi dalam jumlah tinggi. (Ollstein, 2016). Kebijakan Sanders ini merupakan bagian dari upayanya untuk menghimpun sejumlah dana dari Wall Street yang dianggap terlalu kuat dan bahkan mengancam keberadaan para pelaku ekonomi kecil. Dana baru yang dihimpun dari Wall Street ini diharapkan mampu menyokong program pendidikan dan program-program sosial lain yang ditawarkan Sanders.

Selain itu Sanders juga menawarkan kebijakan pajak yang lebih tinggi bagi

mereka yang berpenghasilan tinggi untuk kemudian dana himpunan pajak akan dialokasikan untuk pembangunann.⁶ Terlebih lagi, Sanders akan memberlakukan peningkatan upah minimum yang lebih besar dibandingkan kandidat lainnya yakni menjadi 15 dolar AS per jam. Hal ini tentunya akan menjadi berita baik bagi kaum pekerja perempuan yang hanya mendapatkan 79 sen dari 1 dolar pendapatan yang dicapai oleh laki-laki, atau kaum non-kulit putih kelas ekonomi bawah yang bekerja di bawah upah minimum. Selain upah minimum, Sanders juga menjanjikan biaya kuliah gratis bagi semua kalangan. Melalui beberapa kebijakan progresifnya, Bernie Sanders merupakan kandidat yang menyuarakan ide-ide postfeminisme dan masifnya dukungan kaum milenial terhadap Sanders merupakan implikasi dari pergeseran standar feminisme menuju postfeminisme. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa dukungan kaum milenial terhadap Bernie Sanders lebih besar dibandingkan terhadap Hilary Clinton (lihat Tabel 1).

Tabel 1 Prosentase Dukungan Kaum Milenial dan Masyarakat Berbagai Kalangan Terhadap dua Kandidat Utama Kaukus Primer Partai Demokrat Pemilu Presiden Amerika Serikat

	Sanders%	Clinton%
All millennials	55	38
Men	53	32
Women	57	45
Whites	52	28
Blacks	67	60
Hispanics	52	50
Conservatives	29	26
Moderates	57	37
Liberals	78	51
No college	47	38
Some college	57	32
Graduated college	62	39
Postgraduate work	65	53

Catatan:

1. Hasil Polling didapatkan dengan metode *interview* melalui telepon yang melibatkan 1.754 milenial dan 7.101 orang dewasa berusia setidaknya 37 tahun, pada 1 – 30 April 2016.
2. *Margin of error* berada pada poin \pm 3% pada level kepercayaan 95%. (Sumber: Gallup Poll 1-30 April 2016).⁷

⁶ CNN. 2016. *Hillary vs. Bernie: Their Money and Yours*.<http://money.cnn.com/infographic/economy/hillary-clinton-vs-bernie-sanders/> [diakses pada 1 November 2016].

⁷ Norman, Jim. 2016. *Millennials like Sanders, Dislike Election Proces*. Diakses dari <http://www.gallup.com/poll/191465/millennials-sanders-dislike-election-process.aspx> pada 20 september 2016.

5. Kesimpulan

Pergeseran standar feminisme menuju postfeminisme terjadi ketika kaum milenial memiliki preferensi di luar persepsi gender. Dalam caucus primer Partai Demokrat pemilu Amerika Serikat 2016, kaum milenial tidak lagi terkungkung dalam asumsi bahwa feminisme adalah tentang memilih kandidat presiden perempuan.

Kritik terhadap paradoks perjuangan feminisme melahirkan ide-ide postfeminisme yang sejatinya bukan bertindak sebagai rekonstruksi penuh atas ide-ide feminisme sebelumnya, dan bukan menjadi penanda kegagalan feminisme

sebelumnya. Postfeminisme yang mendekonstruksi subjek ‘perempuan’ sebagai subjek feminisme telah menciptakan ruang yang lebih luas dan perjuangan yang merangkul semua pihak yang teropresi oleh sistem yang dijalankan secara tidak adil. Melalui ide-ide interseksional yang diusung, postfeminisme jauh lebih inklusif dengan memperluas kajian isu feminisme yang tidak hanya terbatas pada dualitas gender namun juga mempertimbangkan karakter sub-identitas seperti ras, agama, orientasi seksual, nasionalitas dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brooks, A. (1997). *Postfeminism: Feminism, cultural theory and cultural forms*. London: Routledge.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. New York: Routledge.
- Center for American Women and Politics (CAWP). (2016). *Women presidential and vice presidential candidates: A selected list*. Retrieved from http://www.cawp.rutgers.edu/levels_of_office/women-presidential-and-vice-presidential-candidates-selected-list
- Foucault, M. (1980). Body/Power. In C. Gordon (Ed.), *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977* (pp. 55-62). London: Harvester.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Harmondsworth, England: Peregrine.
- Foucault, M. (1980). Truth and power. In C. Gordon (Ed.), *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977* (pp. 109-133). London: Harvester.
- Gamble, S. (2001). *The Routledge companion to feminism and postfeminism*. New York: Routledge.
- Gaudiano, N. & Przybyia, H. (2016, January 14). Sanders a hit with millennial women. *USA Today*. Retrieved from <http://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2016/01/14/bernie-sanders-hillary-clinton-womenmillennials/78810110>
- Hansen, L. (2010). Ontologies, epistemologies, and methodologies. In L. J. Shepherd (Ed.), *Gender matters in global politics: A feminist introduction to international relations* (pp. 17-27). New York: Routledge
- Hooks, B. (2000). *Feminism is for everybody: Passionate politics*. Cambridge, MA: South End Press.
- Institute for Women's Policy Research. (2015). *Status of women in the states: Political participation full section*. Retrieved from <https://statusofwomendata.org/explore-the-data/political-participation/political-participation-full-section/>
- Krolokke, C. & Sorensen, A. (2006). *Gender communication theories and analyses: From silence to performance*. London: Sage. <http://dx.doi.org/10.4135/9781452233086>
- McRobbie, A. (2009). *The aftermath of feminism: Gender, culture and social change*. London: Sage.
- Mouffe, C. (1993). *The return of the political*. London: Verso.
- Narayan, U. (1998). Essence of culture and a sense of history: A feminist critique of cultural essentialism. *Hypatia*, 13(2), 86-106. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1527-2001.1998.tb01227.x>
- Ollstein, A. M. (2016). How Bernie Sanders and Hillary Clinton differ on Wall Street. Retrieved from <https://thinkprogress.org/how-bernie-sanders-and-hillary-clinton-differ-on-wall-street-8c746b608db1/>
- Pew Research Center. (2015). Chapter 2: What makes a good leader, and does gender matter? *Women and leadership*. Retrieved from <http://www.pewsocialtrends.org/2015/01/14/chapter-2-what-makes-a-good-leader-and-does-gender-matter/>

- Phillips, A. (2010). What's wrong with essentialism? *Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory*, 11(1), 47-60. <https://doi.org/10.1080/1600910X.2010.9672755>
- Rappeport, A. (2016, February 7). Gloria Steinem and Madeleine Albright rebuke young women backing Bernie Sander. *The New York Times*. Retrieved from http://www.nytimes.com/2016/02/08/us/politics/gloria-steinem-madeleine-albright-hillary-clinton-bernie-sanders.html?_r=0
- Sahadi, J. & Yelin, T. (2016). Hillary vs. Bernie: Their money... and yours. *CNN*. Retrieved from <http://money.cnn.com/infographic/economy/hillary-clinton-vs-bernie-sanders/>
- Suwastini, N. K. A. (2013). Perkembangan feminisme barat dari abad kedelapan belas hingga postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 198-208. <http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>
- Tasker, Y. & Negra, D. (2007). *Interrogating postfeminism: Gender and the politics of popular culture*. Durham, NC: Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822390411>
- Tong, R. (2009). *Feminist thought: A more comprehensive introduction* (3rd ed.). Boulder, CO: Westview Press.
- Uwujaren, J. & Utt, J. (2015). Why our feminism must be intersectional (and 3 ways to practice it). *Everyday Feminism*. Retrieved from <http://everydayfeminism.com/2015/01/why-our-feminism-must-be-intersectional/>
- Williams, D. L., Crittenden, V. L., Keo, T. & McCarty, P. (2012). The use of social media: An exploratory study of usage among digital natives. *Journal of Public Affairs*, 12(2), 127-136. <http://dx.doi.org/10.1002/pa.1414>